



Tindaklanjuti LHP BPK, DPRD Sangihe Gelar Rapat Paripurna

Tahuna, KOMENTAR

Untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas keuangan daerah tahun 2011, DPRD Sangihe menggelar rapat paripurna, Selasa (31/07) kemarin.

Rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Sangihe, Tonao Jangkobus dan

turut dihadiri Sekda Ir Willy Kumentas berlangsung alot antara pihak eksekutif dan legislatif.

Seperti terungkap antara lain, soal penatausahaan aset tetap di lingkungan Pemkab Sangihe yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, soal pembangunan talud pantai Lapango yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan

peraturan presiden nomor 54 tahun 2010.

Kemudian, soal pertanggungjawaban realisasi belanja operasional pada RSUD Liun Kendage Tahuna, di mana tidak sesuai dengan periode anggarannya dan terdapat penggunaan langsung untuk biaya operasional dan realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dalam pembahasan tersebut, masing-masing anggota DPRD telah menyatakan bahwa apa yang menjadi temuan BPK sebagaimana yang tertuang dalam buku catatan rekamendasi BPK, harus ditindaklanjuti oleh dinas terkait berdasarkan ketentuan yang ada. Rapat paripurna tersebut akan dilanjutkan Rabu (01/08) hari ini. ^(ric)